



Ketua DPR Ancam Adik Kandung

- 15 Anggota Komisi X Pemulus Hambalang
- BPK Bantah Intervensi Hasil Audit

” KPK profesional dan *on the track* kemudian *equality before the law*. Semua warga negara sama, termasuk presiden sekalipun. ”

ABRAHAM SAMAD

Ketua KPK

JAKARTA, TRIBUN - Sesaat setelah BPK menyerahkan hasil audit investigatif tahap II proyek Hambalang ke DPR, Ketua DPR Marzuki Alie murka. Ia mengancam mengusir adik kandungnya, Juhaini Alie, apabila terlibat korupsi bersama 14 anggota Komisi X DPR saat menyetujui proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.

Marzuki yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), meyakinkan kalau adiknya, Ju-

haini Alie tak ikut terlibat korupsi massif untuk memuluskan anggaran proyek Hambalang di Komisi X DPR tahun anggaran 2010 maupun 2011.

”Coba pastikan, jangan menyebarkan isu. Ini sama saja menyebarkan fitnah,” kata Marzuki di Jakarta, Jumat (23/8) malam.

Hasil audit investigasi BPK mencatat 15 inisial anggota Komisi X DPR yang memuluskan pembahasan anggaran

■ Bersambung ke Hal 11



Ketua DPR Ancam Adik Kandung

Sambungan Hal. 1

proyek Hambalang yang menyimpangi Pasal 96 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Audit BPK mengungkap para wakil rakyat itu memberi persetujuan alokasi anggaran APBN Kemenpora selama dua tahun yang tak sesuai aturan.

Pertama, 9 anggota DPR yang memberi persetujuan program dan kegiatan pada APBN-P Kemenpora 2010 meskipun anggaran optimalisasi Rp 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja Komisi X dan Kemenpora.

BPK juga mengungkap kejanggalan adanya persetujuan alokasi anggaran APBN Kemenpora 2011, meski tambahan anggaran optimalisasi Rp 920 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Raker antara Komisi X dengan Kemenpora. Selama 2010-2011 anggaran ratusan miliar mengucur tanpa pengawasan. BPK mengidentifikasi 15 anggota DPR yang melawan UU itu dengan inisial. Antara lain, MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, MI, JA, UA, MI, EHP, MY, MHD dan HLS.

Mengenai inisial JA, identik nama Juhaini Alie saat menjadi anggota Komisi X DPR pada rentang waktu 2010-2011. "Saya sudah cek (laporan BPK), tapi tak ada inisial JA," kata Marzuki. Ia mengaku membuka laporan hasil audit BPK, karena menyangkut martabat keluarga besarnya.

"Ya, terpaksa saya baca, karena menyangkut martabat keluarga saya. Jadi nama JA tidak ada sama sekali disebut," tandasnya.

Ia mengaku sejak lama sudah menyangkut kasus Hambalang pada adik kandungnya itu. "Kalau terlibat, sudah saya suruh keluar dia dari DPR. Tapi, jelas dia tidak ikut sama sekali," tegas Marzuki.

Juhaini sendiri menyatakan kesiapannya memberi penjelasan ke KPK. "Sebagai warga negara yang baik harus berani omong. Kita merasa *nggak* salah, semua sudah sesuai prosedur, kenapa harus menghindar?" ujarnya.

Lupa Setujui

Ia tak menampik ikut menandatangani persetujuan alokasi anggaran optimalisasi program dan kegiatan Kemenpora 2010 sebesar Rp 600 miliar. Namun, menurut dia, anggaran itu sudah dibahas dan ditetapkan dalam Raker Komisi X dengan Kemenpora.

"Setiap pembahasan selalu bersama kementerian. Saat pengajuan Rp 600 miliar, itu bukan hanya untuk Hambalang. Itu untuk semua kegiatan Kemenpora. Kalau kita *nggak* setuju, bagaimana kegiatan Kemenpora bisa jalan? Lagipula pimpinan sudah menandatangani, kalau pimpinan sudah tandatangan, tanggung-

jawab pimpinan, kenapa kita *nggak* boleh tandatangan?" kata Juhaini.

"Kalau korupsi itu urusan kementerian dengan orang-orang yang berhubungan dengan proyek. Kalau kita, tidak tahu," tandasnya.

Anggota DPR dari Golkar, Rully Chairul Azwar yang juga disebut-sebut ikut memuluskan alokasi anggaran Kemenpora, menyatakan sebagai tanggungjawab bersama.

"Ya itu tadi mungkin ada perbedaan persepsi, mereka menganggap kalau ada surat pengantar atau persetujuan rincian anggaran. Itu kan tanggungjawab ramai-ramai," ujarnya, santai.

Rully menegaskan, sistem di DPR *collective collegial*, sehingga semua keputusan yang dihasilkan jadi tanggungjawab semua anggota komisi.

Mantan Wakil ketua Komisi X itu bahkan mengaku sempat diperiksa BPK. Sebagai wakil ketua tak pernah memutuskan tanpa persetujuan anggota lainnya. Mengenai tandatangan pencairan anggaran, Rully menanggapi tak melanggar aturan. "Kalau itu yang dipermasalahkan BPK, berarti semua komisi salah ketika melakukan legalisasi," tandasnya.

Berbeda dengan anggota DPR dari PAN, Abdul Hakam Naja. Mantan Wakil Ketua Komisi X itu mengaku lupa. "Ketika ada pembahasan soal Hambalang ini saya ikut rapatnya sebagai salah satu pimpinan. Saya ikut tandatangan atau tidak, saya lupa karena itu kan sebagai pimpinan Komisi X saya ikut diminta persetujuan dan itu prosedurnya memang begitu," tuturnya.

Anggota Komisi X dari PAN lainnya, Eko Hendro Purnomo juga mengaku tak salah meneken persetujuan alokasi anggaran. "Tapi, saat tiba-tiba berubah jadi proyek Hambalang, saya protes. Saya tak setuju karena *frame* awalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga," jelasnya.

Apapun alasan anggota Komisi X, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyerahkan sepenuhnya ke KPK. "Kalau BAKN atau komisi X membahas satu per satu, bahkan sampai akhirnya, silakan. Tapi karena ini sudah di ranah hukum, saya sarankan percayakan pada mekanisme hukum di KPK," kata Priyo.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengawasan keuangan negara.

Disinggung 15 anggota DPR yang diduga terlibat, Priyo enggan memberi tanggapan. "Saya tidak mau komentar, saya belum baca dan Pak Hadi juga tak sebut 15 atau 20 anggota (DPR)," elaknya.

Ketua KPK, Abraham Samad bertindak cepat. Ia memastikan segera memvalidasi dugaan keterlibatan 15 anggota DPR yang masuk audit investigasi BPK. "Apapun dari hasil audit dalam kasus Hambalang kami dalam dan tindaklanjuti. Tak usah khawatir," tegasnya.

BK Tunggu Aduan

Ia memastikan KPK profesional dan tanpa tebang pilih. Semua warga negara, termasuk Presiden SBY, akan dijerat apabila terbukti korupsi.

"Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa KPK bekerja profesional dan on the track kemudain *equality before the law*. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Presiden sama kedudukannya di depan hukum," tandas Abraham.

KPK mengagendakan pekan depan mulai memanggil para tersangka. "Pekan depan, Insya Allah kita lakukan pemanggilan tersangka Hambalang. Tak satupun tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK tidak dilakukan penahanan," janji Abraham.

Mantan Menpora, Andi Marllarangeng telah mendengar kabar audit BPK pasrah. "Saya sudah mendengar audit BPK, kita ikuti saja. Yang pasti saya selalu siap menjalani proses di KPK," kata Andi.

Badan Kehormatan (BK) DPR pun kini menunggu laporan masyarakat untuk memeriksa 15 anggota DPR yang diduga terlibat korupsi Hambalang. "Kita tunggu laporan dari masyarakat, jika hari ini ada laporan langsung kita tindak lanjuti," kata anggota BK DPR Ali Maschan Moesa.

Yang pasti BPK menemukan indikasi legalisasi dari perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, temuan BPK menyebutkan

adanya pencabutan PMK nomor 56/PMK.02/2010 yang diganti dengan PMK nomor 194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan pencabutan itu, kata Hadi, isi PMK diduga mengalami penurunan makna substantif dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak.

"Sehingga, PMK nomor 194/PMK.02/2011 ini patut diduga bertentangan dengan undang-undang. Pertautan ini diduga dilakukan untuk legalisasi penyimpangan yang terjadi pada P3SON Hambalang," jelasnya.

Audit BPK juga mengungkap penyimpangan dalam aspek teknis proyek Hambalang. Lokasi proyek Hambalang ternyata rentan bencana longsor. Menurut Hadi, lokasi proyek Hambalang ada pada zona kerentanan pergerakan tanah bergerak menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM.

Selain itu, hasil investigasi laboratorium teknik sipil yang dilakukan saat pelaksanaan konstruksi menunjukkan kondisi tanah yang bersifat *cemented clay*, yaitu kondisi tanah yang hancur apabila bertemu dengan air. Jika terkena udara luar, lanjut Hadi, tanah itu akan rapuh.

"Perencanaan infrastruktur Hambalang ini tidak menunjukkan adanya kegiatan untuk penanganan kondisi tanah itu terlebih dahulu," tutur Hadi.

Disinggung lambannya penyelesaian audit yang bolak-balik molar, BPK membantah adanya intervensi. "Tidak ada intervensi, kami jamin itu," tandas Anggota BPK Ali Maszykur. (tribunnews/win/acofet/laudet/pas)